

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki peranan penting dalam mendukung operasional sekolah, serta memastikan mutu pendidikan yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah menghadapi tantangan dalam mengelola dana tersebut secara efisien dan akuntabel, terutama terkait dengan pemenuhan standar akuntansi yang berlaku. Keterbatasan kompetensi pengelola keuangan sekolah seringkali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pelaporan, dan penggunaan dana BOS. Keterbatasan lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam manajemen keuangan, terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang sering kali tidak memiliki akses ke pelatihan yang memadai. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga mempersulit sekolah dalam memaksimalkan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kesulitan dalam menyesuaikan prioritas anggaran dengan kebutuhan nyata sekolah, termasuk ketidakcocokan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa dan kebutuhan sekolah, juga menjadi kendala. Potensi korupsi atau penyelewengan dana akibat kurangnya pengawasan ketat dari pihak terkait menambah kompleksitas dalam pengelolaan dana BOS (Lubis et al., 2024).

Peraturan terbaru tentang Dana BOS adalah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan aturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mengatur secara menyeluruh

tata kelola dana operasional mulai dari perencanaan/penganggaran (RKAS/ARKAS), pelaksanaan penggunaan sesuai komponen, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban dengan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan; di dalamnya juga ditegaskan sejumlah ketentuan persentase yang wajib dipatuhi satuan pendidikan, misalnya minimal 10% untuk pengadaan buku serta batasan honor maksimal 20% untuk sekolah negeri (dan 40% untuk swasta) sesuai ketentuan juknis dan implementasinya dalam ARKAS (Kemendikdasmen, 2025).

Peraturan di tahun 2025 melanjutkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Peraturan ini mengatur bahwa pengelola dana BOS di sekolah meliputi beberapa pihak. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan. Selain itu, kepala sekolah juga membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua, bendahara sekolah, dan anggota tim yang melibatkan guru, perwakilan Komite Sekolah, serta perwakilan orang tua peserta didik. Tim ini bertugas untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengelolaan ini juga diverifikasi oleh dinas pendidikan daerah, yang turut berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa sekolah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana BOS (Permendikbud No.6, 2021). Selain itu, pemerintah pusat dan daerah berperan dalam menyalurkan dana dan melakukan pengawasan melalui tim BOS provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk untuk melatih, membimbing, dan memantau pelaksanaan program BOS di sekolah-sekolah yang

berada di bawah yurisdiksi mereka. Meskipun telah diatur dengan jelas dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan dana BOS, seperti kurangnya pemahaman tim BOS sekolah terhadap mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, masih ditemukan kasus di beberapa daerah di mana dana BOS tidak digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah, sehingga berdampak pada efektivitas pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas Pendidikan (Fatima et al., 2022).

Pengelola dana BOS harus memiliki lima kompetensi utama. Pertama, kemampuan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan evaluasi diri. Kedua, kompetensi dalam pemutakhiran data, di mana pengelola wajib memperbarui data sekolah secara lengkap dan valid melalui sistem Dapodik, yang menjadi dasar penyaluran dana. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi, yang berarti pengelola harus mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui laporan yang dipublikasikan. Keempat, kemampuan administrasi keuangan, di mana pengelola, terutama bendahara, harus mahir dalam mencatat, menyusun pembukuan, dan melaporkan realisasi penggunaan dana sesuai dengan ketentuan. Kelima, pengawasan dan evaluasi, yang melibatkan pengelola dari pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan, bimbingan, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dana BOS di sekolah (Dwangu & Mahlangu, 2021). Kelima kompetensi ini dirancang untuk memastikan dana BOS dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah penerima BOS. Namun, dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang mengalami kendala dalam

memenuhi kelima kompetensi ini, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi karena kurangnya pemahaman atau keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, ketidaktepatan dalam pemutakhiran data di sistem Dapodik sering kali menghambat penyaluran dana BOS, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam implementasi program sekolah (Kaindaneh et al., 2024).

Sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan Dana BOS, kepala sekolah harus memiliki berbagai kompetensi, termasuk kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (Permendikbud, 2018). Kompetensi kepala sekolah menurut Perdirjen GTK Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023 mencakup tiga dimensi utama, yaitu kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi kepribadian menekankan integritas, keteladanan, tanggung jawab, serta kematangan sikap dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan mengelola sekolah secara efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis data dan regulasi, termasuk pengelolaan sumber daya sekolah secara akuntabel. Sementara itu, kompetensi sosial menuntut kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan, sehingga tercipta dukungan dan partisipasi yang memperkuat kinerja sekolah. Ketidakmampuan dalam pengelolaan dana dapat menyebabkan kekurangan fasilitas, minimnya sarana pembelajaran, hingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan korupsi, yang berdampak pada reputasi sekolah serta prestasi siswa. Rendahnya kompetensi kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di beberapa sekolah menengah pertama sering disebabkan

oleh kurangnya pemahaman anggaran, keterampilan pelaporan keuangan yang terbatas, serta minimnya pelatihan manajerial. Faktor eksternal seperti dukungan pengawasan yang kurang juga memperburuk situasi ini, sehingga memperlambat upaya peningkatan kualitas pendidikan (Dwangu & Mahlangu, 2021).

Jika kepala sekolah tidak kompeten dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dampaknya bisa sangat merugikan sekolah dan kualitas Pendidikan (Haniatun et al., 2022). Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan kekurangan fasilitas belajar, kurangnya bahan ajar, dan ketidaktersediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai, sehingga menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bisa terabaikan, meningkatkan risiko penyalahgunaan dan korupsi, yang dapat mencoreng reputasi sekolah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kurangnya pengelolaan yang baik juga bisa menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan sanksi dari pihak berwenang. Pada akhirnya, ini semua dapat berdampak negatif pada prestasi akademik siswa dan kesejahteraan guru serta staf sekolah.

Survey telah dilakukan terhadap beberapa kepala sekolah di Kabupaten Deli Serdang melalui sebuah riset tentang pengembangan model pembiayaan Pendidikan (Triadiarti et al., 2023). Penelitian di SMK swasta Kabupaten Deli Serdang menghasilkan model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Hasil survei menunjukkan kepala sekolah minim keterlibatan dalam analisis SPP, sementara pengelolaan RAB dan RKAS sering tidak sesuai kebutuhan. Dana BOS digunakan untuk operasional, dengan pelaporan keuangan belum sesuai standar ISAK 35, menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi akuntansi dan koordinasi

pengawasan. Kesenjangan ini menjadi semakin jelas ketika melihat perbedaan antara sekolah di daerah perkotaan dan terpencil. Sekolah di daerah terpencil cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan dana BOS, terutama terkait keterbatasan akses ke pelatihan dan pendampingan teknis. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti penyediaan fasilitas belajar yang memadai atau dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Akibatnya, siswa di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di daerah perkotaan, yang pada akhirnya berdampak pada kesenjangan mutu pendidikan (Amri, 2015; Kramer & Wibowo, 2024)

Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi yang ada sering kali kurang efektif dalam mendeteksi masalah sejak dini. Dalam beberapa kasus, laporan penggunaan dana BOS hanya bersifat formalitas tanpa disertai verifikasi lapangan yang memadai. Hal ini menyebabkan penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan dana tidak terdeteksi hingga berdampak signifikan pada kualitas operasional sekolah. Sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis data dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa alokasi dana benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang telah direncanakan (Devin et al., 2024).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengelolaan dana BOS di tingkat SMP menunjukkan banyaknya tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana. Kompetensi pengelola, terutama kepala sekolah dan tim BOS, menjadi kunci dalam menciptakan manajemen keuangan yang transparan dan efisien. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan

pelatihan yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap sekolah, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, mampu memanfaatkan dana BOS secara optimal untuk mendukung kualitas pendidikan yang merata (Halimah et al., 2023).

Penelitian oleh Anna Q. Sun dan Joy F. Xin tentang pendapat kepala sekolah mengenai layanan pendidikan khusus dilakukan di Rowan University, Glassboro, New Jersey, Amerika Serikat. Penelitian ini melibatkan 134 responden yang terdiri dari kepala sekolah di berbagai sekolah di wilayah timur laut Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kepala sekolah memiliki pengetahuan terbatas tentang hukum dan peraturan pendidikan khusus, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus secara efektif. Studi ini menekankan perlunya program kepemimpinan universitas untuk memasukkan konten pendidikan khusus untuk mempersiapkan pemimpin sekolah di masa depan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna mendukung inisiatif pendidikan khusus dengan lebih baik (Sun & Xin, 2020).

Riset lain tentang kepemimpinan kepala sekolah dilakukan oleh Philip Saagyum Dare dan Atif Saleem, berasal dari universitas di Australia (Monash University, Melbourne) dan China (Zhejiang Normal University, Jinhua). Riset dalam konteks global, dengan penekanan pada studi kasus dan referensi dari berbagai negara. Penelitian ini memiliki perspektif internasional dan mencakup berbagai sistem pendidikan di seluruh dunia. Tidak ada lokasi spesifik yang dijelaskan sebagai tempat utama penelitian, melainkan fokus pada dampak global pandemi terhadap kepemimpinan sekolah. Penelitian ini membahas peran kepemimpinan kepala sekolah dalam merespon dampak pandemi COVID-19

terhadap proses sekolah. Pandemi memaksa sekolah untuk beradaptasi dengan cepat ke platform virtual dan digital, yang menimbulkan tantangan signifikan terkait dengan ketersediaan dan persiapan sumber daya. Kepala sekolah harus mengembangkan strategi untuk menjaga keselamatan siswa dan staf sambil meminimalkan penyebaran virus. Penelitian ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, yang melibatkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan kemampuan sosial untuk mengatasi krisis. Kepala sekolah juga dihadapkan pada peningkatan pekerjaan regulatif dan kesulitan teknis dalam pengajaran jarak jauh, yang menambah tantangan dalam memimpin sekolah. Penulis menyarankan bahwa kolaborasi, motivasi, dan peningkatan kecerdasan emosional dapat membantu kepala sekolah mengelola situasi krisis dengan lebih baik. (Dare & Saleem, 2022)

Long Le Kim, Trung Tran, dan Le Thi Tuyet Trinh dari Vietnam National University dan Vietnam Academy for Ethnic Minorities meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepala sekolah di provinsi pegunungan Vietnam (Le et al., 2021). Penelitian ini menggunakan alat evaluasi berdasarkan standar profesional Vietnam untuk mengumpulkan data dari 593 kepala sekolah dan 1.647 guru di 16 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah umumnya memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola sekolah, terutama dalam meningkatkan kapasitas pengajaran guru dan memastikan kualitas pendidikan. Namun, mereka menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola sumber daya dan aset sekolah, serta dalam memberikan instruksi kepemimpinan kepada guru, area yang kurang mendapat pelatihan formal. Faktor-faktor sosio-kultural juga mempengaruhi praktik kepemimpinan mereka, termasuk tuntutan untuk menjadi

politis, etis, dan profesional, serta asumsi peran perifer yang banyak. Artikel ini menekankan perlunya pelatihan lebih lanjut untuk mengatasi kekurangan ini dan meningkatkan kompetensi kepala sekolah secara keseluruhan.

Duong Thi Hoang Yen, Le Ngoc Hung, dan Thi Thuy Hang Vu dari University of Education, Vietnam National University, Hanoi, serta Tan Nguyen dari Thua Thien Hue Department of Education and Training, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepemimpinan kepala sekolah menengah atas di Vietnam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan sampel 295 kepala sekolah dari lima provinsi dan kota di Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh faktor individu, faktor tingkat sekolah, dan faktor komunitas pendidikan. Kebijakan pengembangan sekolah dan inovasi infrastruktur serta fasilitas sekolah diidentifikasi sebagai faktor yang paling penting. Selain itu, adaptabilitas terhadap teknologi modern dan dukungan dari pemerintah serta otoritas lokal juga memainkan peran signifikan dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan sekolah pintar. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi profesional kepala sekolah melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dalam mengelola sekolah pintar di era revolusi industri keempat (Le et al., 2021).

Beberapa penelitian di Indonesia pernah dilakukan yang bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan peranannya sebagai manajerial. Indiani melakukan penelitian di SMA Tegar Kelana Suranadi, Lombok Barat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*, mengandalkan data primer dan sekunder yang

dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah cenderung menggunakan gaya kepemimpinan *selling* dan *participating*, yang menyebabkan pengelolaan sekolah kurang efektif. Dualisme kepemimpinan antara ketua yayasan dan kepala sekolah menghambat kegiatan administratif, sehingga proses peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat. Gaya kepemimpinan yang diterapkan kurang mampu menciptakan manajemen sekolah yang efektif sesuai dengan standar yang diatur dalam Permendiknas. (Indiani Indiani et al., 2020)

Hasil riset yang membuktikan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah berhubungan dengan peringkat akreditasi sekolah pernah dilakukan di Kota Sungai Penuh, Jambi (Bustami et al., 2023). Penelitian ini menyarankan bahwa kepala sekolah perlu meningkatkan kompetensi manajerial melalui pelatihan dan evaluasi kompetensi serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang kurikulum dan program pendidikan untuk memastikan lembaga pendidikan yang dipimpinnya memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Isnaini dan Desi Aramana yang bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 di SMP Negeri 3 Babel, Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan dana BOS mencakup penyaluran dana tiap triwulan, pengambilan dana oleh bendahara dan kepala sekolah, serta penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah non-personalia. Pengawasan dilakukan secara internal dan

eksternal, dengan pelaporan dana setiap empat bulan. Hambatan yang dihadapi termasuk keterlambatan penyaluran dana BOS dan perubahan kebijakan oleh dinas terkait. Upaya untuk mengatasi hambatan ini meliputi penggunaan dana talangan dari sumber lain yang belum dimanfaatkan dalam waktu dekat.(Isnaini & Desi Aramana, 2021)

Penelitian (Azzahra & Safira, 2022) menekankan pentingnya kompetensi manajemen keuangan dan kewirausahaan bagi kepala sekolah di Indonesia. Manajemen keuangan yang efektif memastikan penggunaan dana sekolah secara efisien untuk mendukung layanan pendidikan berkualitas, sementara kewirausahaan menggabungkan kepemimpinan, kemandirian, dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan sekolah dan mengatasi tantangan. Survei menunjukkan banyak kepala sekolah dan tenaga pendidik belum memiliki keterampilan yang memadai dalam manajemen keuangan dan kewirausahaan. Program pelatihan di Sumba Barat Daya memberikan hasil positif dalam meningkatkan keterampilan ini, dengan peserta menerapkan praktik manajemen keuangan dan kewirausahaan dalam operasional sekolah mereka. Artikel ini menggarisbawahi kebutuhan akan pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk kepala sekolah dan tenaga pendidik agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan dalam dunia pendidikan.

Riset yang dilakukan oleh Suyati dari Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, menganalisis korelasi antara latar belakang pendidikan tenaga kependidikan dengan kinerja individu dalam mengelola keuangan sekolah. Penelitian ini menyoroti pentingnya ketelitian, akurasi, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan tenaga kependidikan

yang optimal sesuai dengan bidangnya, diharapkan administrasi keuangan sekolah dapat berjalan lebih baik dan terarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi yang ada, serta mengevaluasi kesesuaian antara teori dan realita pengelolaan keuangan di sekolah (Suyati, 2020). Ani Safitri dan Rahmi Alendra Yusiya dari Universitas Ibn Khaldun Bogor meneliti pengelolaan diklat dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelatihan dilakukan oleh LPD UIKA dengan koordinasi PPPP TK dan PLB, tanpa melibatkan peserta secara langsung. Pelatihan berlangsung selama tujuh hari menggunakan pendekatan andragogi. Evaluasi dilakukan melalui penugasan yang dinilai berdasarkan karakter, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kesimpulannya, pengelolaan diklat ini menekankan indikator ketercapaian yang telah ditentukan oleh LPPKS dengan menghadirkan peserta yang memiliki latar belakang serupa. (Safitri & Yusiya, 2020)

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesenjangan signifikan dalam kompetensi kepala sekolah dan pengelola keuangan terkait manajemen sekolah, termasuk dalam pendidikan khusus, kepemimpinan saat krisis, manajemen keuangan, serta pengelolaan sumber daya dan pelatihan. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan dan program pengembangan berkelanjutan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan spesifik pengelola keuangan. Sebagian besar studi menyoroti bahwa solusi yang ditawarkan, seperti pelatihan atau

peningkatan kapasitas, sering kali tidak melibatkan kepala sekolah dan tim pengelola keuangan secara langsung dalam perencanaannya, sehingga kurang efektif dalam mengatasi permasalahan praktis yang mereka hadapi. Untuk menjembatani gap ini, harus ada keterkaitan yang lebih erat antara pengelola keuangan sekolah dengan solusi berupa pendampingan yang adaptif, berbasis kebutuhan lokal, serta menekankan partisipasi aktif dalam setiap tahap pengembangan, guna menciptakan praktik pengelolaan keuangan sekolah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kosgei & Lekhetu, 2025).

Pemilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai objek penelitian dalam riset ini didasarkan pada urgensi peningkatan kompetensi pengelola keuangan sekolah dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sering kali menghadapi berbagai tantangan administratif dan transparansi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 berlanjut dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara akuntabel oleh kepala sekolah dan tim BOS, namun di lapangan masih banyak ditemukan kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sekolah. Hal ini semakin diperkuat oleh penelitian awal yang menunjukkan bahwa kepala sekolah dan bendahara di beberapa SMP masih mengalami kesulitan dalam memahami standar akuntansi, pemutakhiran data, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, keterbatasan pelatihan serta kurangnya pendampingan dalam pengelolaan dana sekolah di tingkat SMP menjadi faktor yang mendukung perlunya intervensi dalam bentuk model pendampingan berbasis manajemen keuangan yang lebih sistematis (Triadiarti, 2025).

Berdasarkan observasi awal dan temuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, kasus kesalahan administratif dan pelaporan keuangan paling sering ditemukan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMP berada dalam posisi transisi manajerial antara karakteristik SD yang cenderung terpusat dan SMA yang lebih mapan secara struktur organisasi. Kajian akan hal ini telah dilakukan oleh Williams & Burgess (2025). Hasil riset membuktikan bahwa kepemimpinan di jenjang sekolah menengah (setara SMP) memiliki karakteristik dan tantangan yang unik, sehingga membutuhkan pelatihan/persiapan kepemimpinan yang spesifik, termasuk penguatan struktur organisasi dan pengembangan profesional yang relevan serta berkelanjutan. Studi ini juga menyoroti bahwa banyak wilayah belum memiliki persyaratan kredensial khusus untuk kepala sekolah menengah, yang berpotensi membuat kesiapan kepemimpinan pada jenjang ini tidak memadai. Kompleksitas pengelolaan dana BOS di SMP belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang kuat. Oleh karena itu, SMP dipilih karena mewakili jenjang pendidikan yang paling membutuhkan intervensi model pendampingan secara sistematis untuk mencegah kesalahan pengelolaan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan dana (Williams & Burgess, 2025).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Berbagai temuan dan kajian menunjukkan bahwa pengelolaan BOS pada satuan pendidikan berisiko mengalami penyimpangan apabila pengendalian internal dan pengawasan tidak berjalan efektif. Permasalahan yang sering muncul

meliputi penggelembungan anggaran (*markup*), pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan, serta keterlambatan pencairan dana. Risiko penyalahgunaan dana bantuan sekolah juga dapat terjadi dalam bentuk penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, dana BOS bahkan sering disebut sebagai salah satu modus yang dominan dalam kasus korupsi di sektor pendidikan (Rohman et al., 2023). Dalam konteks daerah, lemahnya tata kelola dan pengawasan berkorelasi dengan rendahnya efektivitas belanja pendidikan, termasuk indikasi penyalahgunaan dana dan pengadaan yang tidak selaras dengan kebutuhan riil sekolah sebagaimana ditemukan pada konteks Provinsi Sumatera Utara (Harahap et al., 2025). Kondisi ini sejalan dengan adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan beberapa kepala sekolah, di mana sebagian dana BOS diduga digunakan tidak sesuai peruntukan, misalnya melalui penggelembungan harga dalam pengadaan buku dan alat pembelajaran. Permasalahan lainnya adalah kurangnya kompetensi kepala sekolah dan bendahara dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana belum optimal. Terbatasnya pengawasan serta kurang efektifnya koordinasi sekolah dengan dinas pendidikan daerah menyebabkan laporan penggunaan Dana BOS lebih menekankan aspek administrasi, tanpa didukung pemeriksaan lapangan secara memadai; hal ini selaras dengan kajian berbasis pemberitaan yang menunjukkan spektrum risiko audit pengelolaan BOS dan pentingnya monitoring yang konsisten, transparansi pelaporan, serta penegakan akuntabilitas untuk menekan potensi penyimpangan (Istianah et al., 2024). Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan sekolah melalui pendampingan berbasis standar akuntansi, disertai sistem pengawasan yang lebih

ketat agar dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP di Kabupaten Deli Serdang.

Survey terbatas terkait kompetensi pengelola keuangan sekolah dilakukan pada beberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. Hasil survei terbatas menunjukkan bahwa kompetensi pengelola dana BOS, terutama kepala sekolah dan bendahara, masih memerlukan peningkatan signifikan dalam beberapa indikator utama (Triadiarti, 2025). Indikator kompetensi seperti perencanaan RKAS yang relevan, pemutakhiran data secara valid, akuntabilitas dan transparansi dalam laporan, kemampuan administrasi keuangan, serta pengawasan dan evaluasi belum sepenuhnya terpenuhi. Kepala sekolah umumnya kurang terlibat dalam analisis keuangan strategis seperti penetapan SPP atau evaluasi RAB (Triadiarti et al., 2023), sementara pelaporan keuangan sering tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti ISAK 35. Bendahara sekolah, meskipun lebih terlatih dalam pencatatan, masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan yang detail dan akurat. Rendahnya pemahaman kepala sekolah dalam aspek manajerial juga menjadi tantangan dalam memastikan pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Pendampingan yang telah dilakukan selama ini sebagian besar berupa pelatihan teknis untuk bendahara sekolah, yang diselenggarakan secara periodik oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang atau lembaga terkait. Namun, pendampingan ini sering bersifat umum dan tidak cukup spesifik untuk menangani tantangan unik yang dihadapi oleh sekolah, terutama dalam integrasi antara kebutuhan strategis dan teknis pengelolaan dana. Kurangnya koordinasi dalam pengawasan antara Cabang Dinas dan Inspektorat juga memperlemah efektivitas pendampingan. Hal ini menunjukkan perlunya

pendekatan pendampingan yang lebih komprehensif, melibatkan kepala sekolah secara aktif, dan fokus pada pengembangan kompetensi strategis dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi dan manajemen berbasis data.

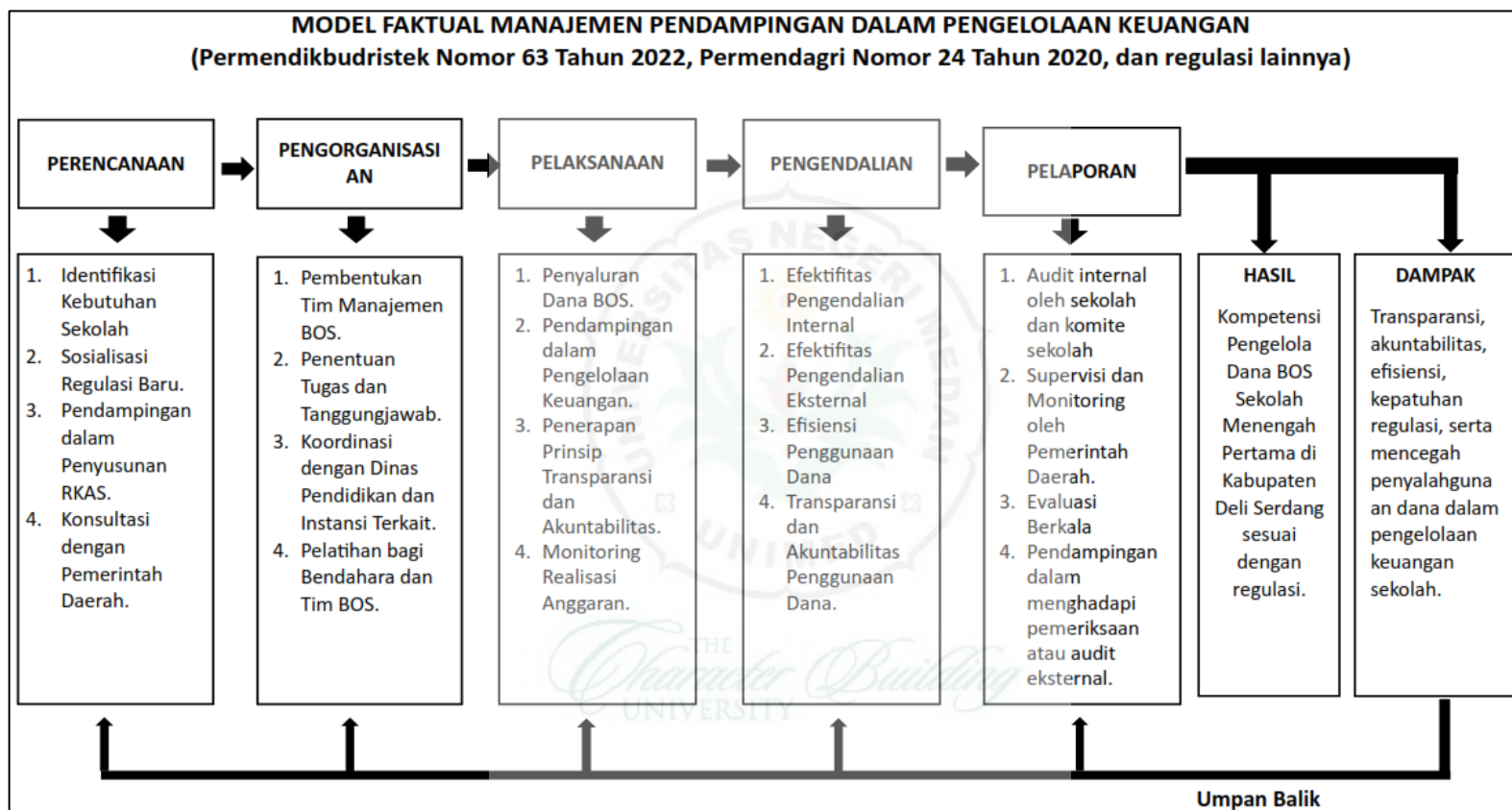
Dalam rangka memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah, selama ini telah dilakukan pendampingan yang sistematis dan berbasis regulasi. Pendampingan ini mengacu pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, Permendagri Nomor 24 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dalam penggunaan dana BOS. Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan agar dapat membantu satuan pendidikan dalam mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menegaskan bahwa tata kelola BOS idealnya berjalan dalam satu siklus yang utuh: sekolah menggunakan dana sesuai RKAS, Tim BOS menyiapkan perencanaan dan pelaporan, Komite memantau serta memberi masukan, dan Dinas membimbing sekaligus memverifikasi laporan sebagai bentuk pengawasan berjenjang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa rantai pendampingan dan verifikasi ini belum sepenuhnya bekerja seperti yang diharapkan, terutama pada aspek penguatan kapasitas teknis dan kualitas pertanggungjawaban berbasis standar akuntansi.

Gambar 1.1 menggambarkan model faktual dari manajemen pendampingan pengelolaan keuangan sekolah yang selama ini dilakukan berdasarkan regulasi. Gambar tersebut menunjukkan model faktual manajemen pendampingan pengelolaan keuangan Dana BOS yang berjalan secara siklik dan berbasis regulasi, dimulai dari perencanaan (identifikasi kebutuhan sekolah, sosialisasi regulasi baru, pendampingan penyusunan RKAS, dan konsultasi dengan pemda), dilanjutkan pengorganisasian (pembentukan Tim Manajemen BOS, pembagian tugas-tanggung jawab, koordinasi dengan dinas/instansi terkait, serta pelatihan bagi bendahara dan tim), kemudian pelaksanaan (penyaluran dana, pendampingan pengelolaan keuangan, penerapan prinsip transparansi-akuntabilitas, dan monitoring realisasi anggaran), selanjutnya pengendalian untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dan diakhiri pelaporan (audit internal sekolah/komite, supervisi–monitoring pemerintah daerah, evaluasi berkala, serta pendampingan saat pemeriksaan/audit eksternal), dengan mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Sebagai suatu model manajemen, pendampingan pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dalam lima tahapan utama. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana sekolah menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas yang telah dianalisis serta sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Tahap kedua adalah pengorganisasian, di mana tim pengelola dana BOS dibentuk dengan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Tahap ketiga adalah pelaksanaan, yang mencakup penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan pendampingan teknis dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Tahap keempat adalah pengendalian, di mana dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran guna mencegah penyimpangan serta meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Tahap kelima adalah pelaporan, di mana sekolah menyusun laporan penggunaan dana BOS secara berkala dan melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti dinas pendidikan dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan pada SMP di Kabupaten Deli Serdang, dampak faktual dari pengelolaan Dana BOS saat ini terlihat pada belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi karena kapasitas pengelola masih terbatas dan belum merata; temuan menunjukkan sekitar 60% responden belum pernah mengikuti pelatihan SAP, sehingga pemahaman standar akuntansi yang menjadi dasar pertanggungjawaban masih lemah. Kondisi ini diperkuat dengan praktik pelaporan yang masih didominasi cara manual atau semi-digital, di mana sekitar 70% sekolah menyusun laporan BOS belum sepenuhnya berbasis sistem, sehingga meningkatkan peluang kesalahan pencatatan, menyulitkan verifikasi, dan membuat laporan cenderung administratif. Akibatnya, efektivitas pemanfaatan BOS berpotensi menurun karena waktu dan energi pengelola banyak terserap untuk urusan administrasi, sementara pengawasan berbasis bukti belum berjalan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan risiko ketidaksesuaian penggunaan dana dan melemahkan kontrol mutu tata kelola (Triadiarti, 2025).



Gambar 1. 1 Model Faktual Pendampingan Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Deli Serdang

Pengelolaan keuangan di sekolah melibatkan penerapan berbagai teori dan model untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien. Beberapa teori yang sering digunakan dalam pengelolaan keuangan di sekolah berdasarkan riset yang dilakukan antara lain adalah Teori Manajemen Keuangan Modern. Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sistematis, terprogram, dan transparan. Misalnya, penerapan anggaran yang profesional dan pelaporan keuangan yang akuntabel kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (Sholihah, 2018). Teori Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi lebih menguatkan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pendekatan ini memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilakukan secara jujur dan terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan (Gusnardi et al., 2021)

Teori Kepemimpinan dan Manajemen Keuangan mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik memerlukan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah dan tim manajemen harus terlibat secara aktif dalam proses penganggaran dan pengendalian keuangan untuk mencapai keberhasilan akademik dan operasional sekolah. Teori ini berbasis pada teori kepemimpinan perilaku yang dikemukakan oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an, yang menekankan bahwa orang dapat belajar menjadi pemimpin melalui pelatihan dan pengamatan (Odide, 2021). Manajemen anggaran dan kontrol keuangan yang baik berdampak positif pada kinerja akademik siswa. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam manajemen keuangan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja akademik. Pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif sangat penting

untuk keberhasilan pendidikan dan kinerja akademik siswa yang optimal. Pengelolaan keuangan yang efektif di sekolah memerlukan penerapan teori-teori manajemen keuangan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, pengendalian keuangan, dan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan Pendidikan.

Beberapa teori telah dikembangkan dalam pemodelan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah diantaranya teori dalam Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Sekolah (Karmilawati, 2021). Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pengembangan model ini indikator keberhasilan pengelolaan menjadi lebih banyak yaitu melibatkan tim manajemen sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua dalam proses pengelolaan keuangan. Pemodelan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah telah mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan integrasi berbagai *stakeholder* dalam proses pengelolaan keuangan.

Kesimpulan dari berbagai teori dan model yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah menunjukkan adanya gap antara prinsip-prinsip ideal seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan pelaksanaan nyata di lapangan. Meskipun teori-teori seperti Manajemen Keuangan Modern dan Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Sekolah menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan penerapan sistem yang profesional, banyak sekolah masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten. Kurangnya keterampilan kepemimpinan yang kuat, minimnya

pelatihan yang berkelanjutan, dan rendahnya partisipasi *stakeholder* kerap menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang terstruktur, berbasis teori, dan berorientasi praktik untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi, serta memastikan pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Konsep yang paling relevan untuk mewujudkan program pendampingan yang efektif ada di dalam teori tentang *Competency-Based Mentoring Model*. *Competency-Based Mentoring Model* adalah pendekatan pendampingan yang fokus pada pengembangan kompetensi spesifik individu melalui bimbingan terstruktur dan terukur. Filosofinya berakar pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan profesional. Dengan menggunakan kerangka kompetensi, model ini membantu mengidentifikasi *competency gap* dan menyusun rencana pengembangan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pendekatan ini melibatkan asesmen awal, pengaturan tujuan, pelaksanaan mentoring, dan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian standar kompetensi yang diinginkan. Model ini diterapkan secara luas di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan layanan kesehatan, dengan hasil yang terukur dalam peningkatan kinerja dan keahlian individu.

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, *Competency-Based Mentoring Model* menawarkan manfaat strategis dengan meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana secara akuntabel. Melalui mentoring, pengelola dapat menguasai keterampilan teknis seperti penyusunan laporan keuangan berbasis regulasi atau penggunaan teknologi akuntansi. Implementasi model ini tidak hanya meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, model ini membantu sekolah memperkuat tata kelola keuangan untuk mendukung tujuan pendidikan jangka panjang. Integrasinya dalam manajemen sekolah adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan memastikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Selain faktor kelemahan kompetensi manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan, perlu juga diperhatikan perkembangan kebijakan terbaru dari pemerintah yang merefleksikan pergeseran paradigma kepemimpinan pendidikan. Hal ini terlihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 6565/B.B1/HK.03/2020 tentang Program Pendidikan Guru Penggerak, yang kemudian diperkuat melalui Perdirjen GTK Nomor 5383/B.B1/GT.03.15/2022. Kedua perdirjen tersebut menetapkan bahwa kepala sekolah harus memiliki tiga kompetensi utama, yaitu kepemimpinan pembelajaran, manajemen sekolah, dan pengembangan kewirausahaan.

Ketiga kompetensi ini merupakan fenomena teoritik baru dalam kebijakan pendidikan Indonesia karena menuntut kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pemimpin transformatif yang mampu mengelola perubahan, mendorong inovasi, dan memastikan tata kelola sekolah yang akuntabel. Namun demikian, temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kompetensi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek manajemen berbasis data dan pengelolaan keuangan sekolah secara profesional.

Gap antara kebijakan normatif dan realitas implementatif ini memperkuat urgensi perlunya model pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu membina kompetensi secara menyeluruh dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini merespons tantangan tersebut melalui pengembangan *Competency-Based Mentoring Model* (CBMM) yang secara teoritik dan praktik memiliki keunggulan dalam meningkatkan kemampuan kepala sekolah mengelola Dana BOS secara akuntabel dan berstandar.

Meskipun pengelolaan Dana BOS merupakan topik yang sensitif karena menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas publik, peneliti telah mempertimbangkan pendekatan etis dan kehati-hatian dalam merancang proses pengumpulan data. Seluruh partisipan akan dilibatkan berdasarkan prinsip persetujuan sukarela (*informed consent*), dan identitas sekolah maupun responden akan dijaga kerahasiaannya. Justru karena aspek sensitif inilah, penelitian ini menjadi signifikan untuk mendukung upaya perbaikan sistemik, bukan untuk menyalahkan individu atau institusi. Penekanan pada peningkatan kapasitas melalui model pendampingan menjadi pendekatan konstruktif dalam mendorong perubahan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini berpusat pada tahapan pengembangan, uji coba, dan penyempurnaan model, yang dimulai sejak tahap ketiga dalam *roadmap* penelitian. Pada tahap ini, peneliti merancang dan mengembangkan model manajemen pendampingan pengelolaan keuangan berbasis standar akuntansi yang dirancang khusus untuk pengelola dana BOS di tingkat SMP. Kebaruan muncul dari desain model yang belum pernah ada sebelumnya, baik dari segi struktur, pendekatan, maupun konten yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi ke

dalam proses pendampingan secara sistematis. Pengembangan desain model pendampingan pada tahap ketiga tersebut disusun menggunakan kerangka ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) agar proses perancangan berlangsung terstruktur, terukur, dan mudah direplikasi (Mudjisusatyo et al., 2025) (Spatioti et al., 2022). Pada fase **analisis**, peneliti memetakan kebutuhan kompetensi pengelola Dana BOS SMP, celah praktik pengelolaan keuangan, serta titik rawan ketidakpatuhan regulasi yang dapat diminimalkan melalui penerapan standar akuntansi. Hasil analisis kemudian diterjemahkan pada fase **desain** menjadi rancangan alur pendampingan, peran pendamping–pendampingan, mekanisme bimbingan tatap muka/daring, serta perangkat pendukung (modul, SOP, instrumen monitoring, dan format dokumen pelaporan) yang selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi berbasis standar akuntansi. Pada fase **pengembangan**, rancangan model diwujudkan menjadi prototipe operasional yang mencakup materi pendampingan, langkah kerja setiap tahapan, panduan pelaksanaan, serta instrumen evaluasi kompetensi dan keterlaksanaan. Fase **implementasi** diposisikan sebagai tahap penerapan awal model pada konteks sekolah sasaran secara terbatas untuk memastikan prosedur dapat dijalankan, sementara fase **evaluasi** digunakan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian model melalui umpan balik terstruktur sebagai dasar penyempurnaan (Li & Cheong, 2023; Moses Adeleke Adeoye et al., 2024).

Keunggulan utama penggunaan model ADDIE adalah kerangka kerjanya yang sistematis namun fleksibel untuk memastikan program (pelatihan/pendampingan) dibangun berbasis kebutuhan nyata, memiliki alur kerja yang jelas dari Analisis–Desain–Pengembangan–Implementasi–Evaluasi, serta

memungkinkan perbaikan iteratif melalui umpan balik pada setiap tahap sehingga kualitas dan kesesuaian produk dapat dikendalikan secara berkelanjutan; dengan ADDIE, tujuan, materi, strategi pelaksanaan, dan instrumen evaluasi dapat disejajarkan secara konsisten, sehingga memudahkan standardisasi, replikasi, dan pengukuran efektivitas implementasi pada konteks pengguna sasaran (Ding & Toran, 2025; Yang & Hasnah, 2025).

Proses ini memungkinkan terciptanya bentuk akhir model yang bukan hanya baru dari sisi teori, tetapi juga terbukti efektif secara empiris. Inilah momen di mana kebaruan model benar-benar terbentuk secara utuh, karena telah melalui proses validasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi *novelty* penelitian ini terletak pada penciptaan model baru yang orisinal, relevan dengan kebutuhan pengelola dana BOS, serta mampu meningkatkan kompetensi mereka melalui pendekatan berbasis standar akuntansi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, masalah yang teridentifikasi mencakup beberapa aspek utama terkait dengan peran dan kompetensi pengelola keuangan sekolah serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berikut adalah beberapa masalah yang diidentifikasi:

1. Masih ada kepala sekolah yang kurang memiliki kompetensi kepemimpinan yang efektif dan keterampilan manajerial yang memadai termasuk dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi berbagai aktivitas di sekolah.

2. Kepala sekolah menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya tanpa pelatihan formal yang memadai.
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan sekolah.
4. Kurangnya pelatihan manajerial dan finansial bagi kepala sekolah dan tim pengelola keuangan sekolah menyebabkan rendahnya pemahaman pengelolaan keuangan sekolah.
5. Pengelolaan dana BOS di sekolah sering tidak efisien dan kurang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
6. Pengelolaan dana BOS seringkali tidak transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.
7. Perencanaan anggaran di sekolah yang kurang efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata sering terjadi sehingga menghambat proses belajar mengajar dan penyediaan fasilitas pendidikan.
8. Kurangnya koordinasi oleh lembaga terkait dalam pengawasan dan pelaporan keuangan sekolah.
9. Penerapan standar akuntansi masih kurang dilakukan secara konsisten dalam pelaporan keuangan.
10. Dukungan dan kerjasama yang tidak memadai dari stakeholder pendidikan menghambat pengelolaan sekolah.
11. Tekanan administratif yang tinggi membebani kepala sekolah dalam menjalankan tugas manajerial.
12. Tantangan sosio-kultural, termasuk tuntutan politis dan etis, memengaruhi praktik kepemimpinan kepala sekolah.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam kajian ini terletak pada keterbatasan kompetensi kepemimpinan dan manajerial pengelola keuangan sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif dan efisien. Selain itu, kajian ini juga terbatas pada pengamatan terhadap pengelolaan keuangan sekolah yang kurang transparan dan akuntabel, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pengelola dana BOS yang mengakibatkan rendahnya pemahaman dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Tantangan eksternal seperti dukungan *stakeholder* yang tidak memadai dan tekanan administratif yang tinggi juga menjadi batasan yang signifikan dalam penelitian ini, sehingga mempengaruhi hasil dan implementasi dari rekomendasi yang diusulkan.

Kajian ini memiliki batasan masalah yang difokuskan pada pengembangan, kelayakan, dan efektivitas Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini tidak mencakup aspek pengelolaan dana BOS di jenjang pendidikan lain, seperti Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), serta tidak membahas faktor eksternal di luar implementasi model, seperti kebijakan pendanaan pemerintah yang lebih luas atau dinamika ekonomi yang memengaruhi alokasi dana BOS. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik model pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pengelola dana BOS di SMP, menguji kelayakannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas model tersebut dalam meningkatkan kompetensi pengelola dalam aspek perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan

keuangan sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan sekolah yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagaimana kelayakan Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deli Serdang.
3. Bagaimana efektivitas dari Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diselesaikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deli Serdang.

2. Menguji Kelayakan Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deli Serdang.
3. Menguji efektivitas dari Model Manajemen Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi dalam meningkatkan kompetensi Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yang signifikan, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Berikut adalah rincian manfaat penelitian ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang signifikan, yaitu melakukan pengayaan dan penguatan teori yang berkaitan dengan model manajemen pendampingan pengelolaan keuangan berbasis Standar Akuntansi. Secara keseluruhan, manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan berbagai teori yang relevan dengan kepemimpinan, manajemen keuangan, pelatihan dan pengembangan, serta peran stakeholder dalam konteks pendidikan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat praktis yang signifikan, antara lain:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan akan bermanfaat sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam upaya peningkatan kompetensi tentang pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Dana BOS dengan menerapkan Model Manajemen Pendampingan berbasis Standar Akuntansi. Hasil riset ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan manajerial dan akuntansi berbasis standar, memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan yang transparan, serta membangun koordinasi yang lebih efektif dengan *stakeholder* pendidikan. Selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran penggunaan model manajemen pendampingan di sekolah-sekolah.
2. Bagi Kepala Sekolah bermanfaat sebagai bahan refleksi diri untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien melalui pendampingan berbasis Standar Akuntansi. Kepala sekolah dan tim akan memperoleh pelatihan dan bimbingan yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, yang dapat meningkatkan keterampilan manajerial dan keuangan mereka.
3. Bagi bendahara Dana BOS akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan administrasi keuangan, khususnya dalam penyusunan anggaran, pencatatan, dan pelaporan dana sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti ISAK 35. Riset ini juga membantu bendahara memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, sehingga mampu menghindari risiko penyalahgunaan dana.
4. Bagi peneliti berikutnya bermanfaat sebagai bahan bandingan dan rujukan dalam melakukan penelitian yang sejenis. Penelitian ini menyediakan landasan

teoretis dan empiris yang kaya untuk eksplorasi lebih lanjut terkait pengelolaan Dana BOS.

